

Jurnal Penelitian Hukum De Jure adalah majalah hukum triwulan (*Maret, Juni, September dan Desember*) diterbitkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bekerjasama dengan **IKATAN PENELITI HUKUM INDONESIA (IPHI) Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-13.AHA.01.07 Tahun 2013, Tanggal 28 Januari 2013**, bertujuan sebagai wadah dan media komunikasi, serta sarana untuk mempublikasikan aneka permasalahan hukum yang aktual dan terkini bagi para peneliti hukum Indonesia khususnya dan kalangan masyarakat pemerhati hukum pada umumnya.

Pembina

Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia

Pengarah

Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kepala Pusat Pengembangan Data dan Informasi Peneliti Hukum dan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum
Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia
Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

Pemimpin Umum

Henry Donald Lbn Toruan, S.H., M.H. (Ketua Ikatan Peneliti Hukum Indonesia)

Pemimpin Redaksi

Ahyar Ari Gayo, S.H., M.H., APU (Hukum Islam, BALITBANGKUMHAM)

Anggota Dewan Redaksi

Marulak Pardede, S.H., M.H., APU (Hukum Ekonomi BALITBANGKUMHAM)
Mosgan Situmorang, S.H., M.H. (Hukum Perusahaan, BALITBANGKUMHAM)
Henry Donald Lb. Toruan, S.H., M.H. (Hukum Perdata, BALITBANGKUMHAM)
Nevey Varida Ariani, SH., M.H. (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)
Hardianto Djanggih, S.H., M.H. (Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Tompotika Luwuk Banggai)
Muhaimin, S.H. (Hukum Pidana, BALITBANGKUMHAM)

Redaksi Pelaksana

Fitriyani, S.H., M.Si.

Sekretariat

M. Vrsyah Jayadilaga, S.Si., M.P
Asmadi, S.H.

Tata Usaha

Dra. Evi Djuniarti, M.H.
Lindung Budi Mulyawan, S.H.
B. Lora Christyanti, S.IP.

Teknologi Informasi dan Desain Layout

Machyudhie, S.T. (Teknologi Informasi)

Agus Priyatna, S.Kom. (Desain Layout)

Harysandy Permana, S.Kom. (Teknologi Informasi)

Mitra Bestari

1. Prof. Dr. Hibnu Nugroho, S.H., M.Hum.
Fakultas Hukum, Universitas Jenderal Soedirman (Hukum Acara Pidana)
2. Dr. Mohd Din, S.H., M.H.
Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala Banda Aceh (Hukum Pidana)
3. Dr. Sukirno, S.H., M.Si.
Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Hukum Adat)
4. Dr. Dra. Farhana, S.H., M.H., M.Pd.
Fakultas Hukum Universitas Islam Jakarta (Hukum Pidana)
5. Dr. Budi Santoso, S.H., LL.M.
Fakultas Hukum Universitas Brawijaya (Hukum Perdata, Hukum Perusahaan, Hukum Ketenagakerjaan)

Alamat Redaksi:

Gedung Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM
Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 4-5, Lantai 7, Kuningan, Jakarta Selatan
Telepon (021) 2525015, Faksimili (021) 2526438

Email:

balitbangkumham@gmail.com

ejournaldejure@gmail.com

Percetakan PT Pohon Cahaya

Jalan Gedung Baru 18 Jakarta Barat 11440
Telpon (021) 5600111, Faksimili (021) 5670340

Redaksi menerima naskah karya asli yang aktual di bidang hukum berupa hasil penelitian dari berbagai kalangan, seperti: peneliti hukum, praktisi dan teoritis, serta berbagai kalangan lainnya. Tulisan-tulisan yang dimuat merupakan pendapat pribadi penulisnya, bukan pendapat redaksi.

Redaksi berhak menolak, menyingkat naskah tulisan sepanjang tidak mengubah isinya. Naskah tulisan dapat dikirim ke alamat redaksi, dengan memperhatikan Pedoman Penulisan Naskah dan di-submit pada aplikasi *Open Journal System (OJS)* pada URL/website: ejournal.balitbangham.go.id

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|---|------------|
| DAFTAR ISI | iii |
| ADVERTORIAL | v |
| KUMPULANABSTRAK | vii |
| | |
| Jangkauan Hukum Nasional Terhadap Prostitusi Daring (<i>State Laws Coverage on Online Prostitution</i>)..... | 1 -10 |
| Eko Noer Kristiyanto | |
| | |
| Perlindungan Hukum bagi Pengguna Internet terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online (<i>Legal Protection for Internet Users Against Web Contents with Clickbait on Online Media</i>)..... | 11 - 30 |
| Qur’ani Dewi Kusumawardani | |
| | |
| Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik (<i>Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions</i>) | 31 - 52 |
| Tony Yuri Rahmanto | |
| | |
| Hakim Komisaris dan Miscarriage of Justice dalam Sistem Peradilan Pidana (<i>Commissioner Judge and Miscarriage in the Criminal Justice System</i>) | 53 - 68 |
| I Wayan Gede Rumega | |
| | |
| Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Peraturan Perundang–Undangan (<i>Laws and Regulations of Naturalization Procedures Due to Double Citizenship Status</i>) | 69 - 84 |
| Nevey Varida Ariani | |
| | |
| Layanan Hukum Legalisasi dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum (<i>Authentication Services for Legal Certainty</i>)..... | 85 - 96 |
| Edward James Sinaga | |
| | |
| Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum (<i>Indigenous Legal Communal Rights in the Land Acquisition for Public Purposes</i>)..... | 97 - 108 |
| Rahmat Ramadhani | |

Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen
(*Standard Contract in Legal Perspectives of Consumer Protection*)..... 109 - 120

Sri Lestari Poernomo

Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Pelajar/Mahasiswa dalam Memperoleh Narkoba
(Studi pada Survei Penyalahgunaan Narkoba di Kelompok Pelajar dan Mahasiswa Tahun 2016)
(*Judicial Review on Students / College Students when Acquiring Drugs (Study on the Drug Abuse Survey in Student and College Student Groups in 2016)*)..... 121 - 136

Novita Sari

BIODATA PENULIS

PEDOMAN PENULISAN

ADVERTORIAL

Puji syukur kehadiran Allah SWT, Jurnal Penelitian Hukum De Jure yang diterbitkan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia bekerjasama dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI bisa kembali menerbitkan Volume 19 di tahun 2019.

Penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure Volume 19 tahun 2019 ini, khususnya Volume 19 Nomor 1 Maret 2019, akan memuat (Sembilan) tulisan dari berbagai institusi lembaga penelitian yang ada di Indonesia. Sebagaimana diketahui, seiring dengan berkembangnya pemanfaatan Teknologi Informasi, media, dan komunikasi yang telah mengubah perilaku masyarakat maupun peradaban manusia secara global menyebabkan hubungan dunia menjadi tanpa batas dan menyebabkan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya secara cepat. Adanya perkembangan kemajuan teknologi informasi berakibat memunculkan pula berbagai persoalan-persoalan hukum tersebut. Salah satu persoalan hukum yang muncul dari pemanfaatan teknologi informasi ini adalah berbagai kejahatan. Berbagai kejahatan dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi informasi seperti proses prostitusi, perjudian di dunia maya (internet), pembobolan Automated Teller Machine (ATM), pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik. Kejahatan-kejahatan tersebut sangat diperlukan hukum untuk mengatur dan proses penegakannya oleh para penegak hukum.

Kejahatan-kejahatan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi di atas yang dikukan oleh orang-orang menguasai dan memahami teknologi canggih, hal ini akan membuat banyak korban dimana korbanya banyak kurang memahami dan menguasai teknologi atau media elektronik sehingga sulit untuk meminta pertanggung jawaban pelaku kejahatan tersebut. Di samping pengaturan kebutuhan para penegak hukum yang mumpuni terhadap pemanfaatan teknologi informasi ini sangat di butuhkan.

Berkaitan dengan hal tersebut, redaksi Jurnal Penelitian Hukum De Jure dalam Volume 19 Nomor 1 Maret 2019 ini, mengangkat tulisan seputar dampak dari kemajuan dan Femanfaatan Teknologi Informasi di berbagai bidang. Seperti Penegakan Huykum terhadap tindak pidana penipuan berbasis transaksi elektronik, Perlindungan hukum terhadap fenomena clickbait di media onlime, Prostitusi Daring dan Jangkauan Hukum Nasional dan berbagai topik lainnya.

Kami menyampaikan terima kasih kepada penulis yang telah memberikan kepercayaan kepada Jurnal Penelitian Hukum De Jure untuk menerbitkan hasil karyanya.

Akhirnya kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan HAM Kementerian Hukum dan HAM RI dan Ikatan Peneliti Hukum Indonesia yang telah berkenan membantu dalam penerbitan Jurnal Penelitian Hukum De Jure ini.

Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Mitra Bestari yang telah bersedia membantu memeriksa dan mengoreksi tulisan dari para penulis dalam penerbitan ini.

Redaksi

Jakarta, Maret 2019

HALAMAN KOSONG

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Eko Noer Kristiyanto (*Law and Human Rights Research and Development Agency the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia*)

State Laws Coverage on Online Prostitution

Law Research Journal De Jure, 2019 March, Volume 19, Number 1, Page 1 - 10

Online prostitution is unavoidable when technology and internet access are increasingly massive in people's lives. Prostitution, in whatever form it takes, always causes restlessness to the people as it is considered as violating the prevailing moral principles. Law is considered as a means capable of being the solution in overcoming this problem. This research is attempting to depict the existence of online prostitution and to which extent the national law is able to cover such online prostitution activities. It turns out that despite of no specific laws and regulations regarding online prostitution, law enforcers are still able to ensnare the perpetrators when certain conditions are met.

Keywords: *online prostitution; norms; internet; law enforcement.*

Qur'ani Dewi Kusumawardani (*Human Resources Research and Development Agency of the Ministry of Communication and Informatics*)

Legal Protection for Internet Users Against Web Contents with Clickbait on Online Media

Law Research Journal De Jure, 2019 March, Volume 19, Number 1, Page 11 - 30

The internet has created opportunities and challenges as well as influenced the changes in the digital culture of Indonesia. According to the research of the HR Research and Development Agency of the Ministry of Communication and Information Technology in 2017, 72.13% of the Indonesian people are ICT users, but the literacy rate is low and the lazy reading habits (the research by the Central Connecticut State University on the World's Most Literate Nation shows that the literacy level of Indonesian people is in the 60th position out of the 61 surveyed countries) making it easier for Indonesians to be hit by click feedback. The method used in this research is the normative juridical method, a qualitative research with descriptive analysis. The results obtained from this research, are firstly, there are no laws and regulations that specifically regulate this clickbait. Click bait headlines currently are widely used in the world of journalism and this article will be considered as an article that does not violate any law if grounded only on activities with hyperbolic headlines, but clickbait articles will be considered illegal if they contain illegal content such as insult, defamation, decency violations, hoaxes, gambling, extortion, threats, fraud that may harm consumers, provocations that bring hatred towards ethnicity, religion, race and between groups (SARA), that may increase hostility between individuals, poses the threat of violence or personal scare. Secondly, the methods used to reduce the articles with click bait include education, improvement of community literacy, learning about the critical news consumption, or can be pursued through legal proceedings both under the civil or penal codes.

Keywords: *legal protection; clickbait; online media.*

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Tony Yuri Rahmanto (Law and Human Rights Research and Development Agency the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia)

Legal Enforcement Against Fraudulent Acts in Electronic-Based Transactions

Law Research Journal De Jure, 2019 March, Volume 19, Number 1, Page 31 - 52

Fraudulent acts are currently flourishing following the era and technology advancement. Laws and regulations are made to anticipate this, but the existing laws and regulations seem like unable to combat the crime amid their increase in occurrences. This research aims to: firstly, to identify law enforcement against the e-commerce-based frauds; and secondly, to identify the obstacles in criminal law enforcement against e-commerce-based frauds. This research was conducted by using normative juridical method through literature research by examining secondary data including legislation, research results, scientific journals and references. The research results describe that the e-commerce-based fraudulent acts in principle are similar to the conventional frauds but differ in the evidences or means of action as the latter uses electronic systems (computers, internet, telecommunications equipment). Therefore, the legal enforcement against this kind of frauds is still under the applicability of the Indonesian Criminal Code and the Law No. 19 of 2016 regarding Amendments to the Law No. 11 of 2008 regarding Information and Electronic Transactions. Further, the law enforcement against the fraudulent acts in electronic-based transactions has been prevented at least by the following five factors, the laws and regulations, law enforcers, infra-structure or facilities that support the law enforcement, community and cultural factors.

Keywords: law enforcement; fraud; electronic transactions.

I Wayan Gede Rumega (Post-Graduate Doctoral Program at the School of Law, Udayana University, Bali)

Commissioner Judge and Miscarriage in the Criminal Justice System

Law Research Journal De Jure, 2019 March, Volume 19, Number 1, Page 53 - 68

The criminal law enforcement process turns out to be able to violate of the rights of the perpetrators as a result of the actions taken by the criminal law enforcers. In such connection, the criminal procedures law provides a means to test the actions taken by such law enforcers whether or not they have violated the human rights. The formulation of the issues in this research is the role of the commissioner judge in dealing with the Miscarriage of Justice according to the criminal justice system in Indonesia? The method used in this research is a normative legal research method with descriptive analysis approach. The commissioner judge is established in order to provide better protection of human rights of a person accused of committing an offense in the criminal justice process. The commissioner judge will prevent any disagreement on the legality of the actions taken during the preliminary examination, whether the arrest, detention, search and seizure are legal or not as this is related to human rights issues related to the suspects / defendants, being the right to freedom and liberty, right to own assets and right to protection against insecurity and disturbance. Guaranteed protection of the suspects / defendants' rights during the preliminary investigation stage should be the manifestation of the functions of the criminal procedures law which is to administer fair trials in order to find the material and essential truth. Forced efforts committed by the Investigator in order to collect preliminary evidences must not be up to the investigators but be subjected to examination by the the commissioner judge.

Keywords: judge commissioner; miscarriage; criminal justice.

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Nevey Varida Ariani (Law and Human Rights Research and Development Agency Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia)

Laws and Regulations of Naturalization Procedures Due to Double Citizenship Status

Law Research Journal De Jure, 2019 March, Volume 19, Number 1, Page 69 - 84

In terms of citizenship status, the state is responsible for respecting, protecting, and satisfying the citizens' rights as a form of state protection to its citizens. Legislation regarding citizenship issues in the form of the currently applicable laws and regulations constitute one form of manifestation of state responsibility in this matter. Based on the conditions above, problems have arisen with regard to the naturalization process due to the status of dual citizenship based on the prevailing laws and regulations. This research uses juridical-empirical method. In the enforcement of the substantive laws and regulations related to the duties and functions of the Director General of Public Legal Administration and the Directorate General of Immigration of the Ministry of Law and Human Rights and the Director General of Population Affairs and Civil Registry Office of the Ministry of Home Affairs regarding electronic ID cards that valid for life for the residents of 18 years of age and the provisions laws and regulations requiring them to choose their own citizenship at the maximum age of 21 years it is necessary to amend the Government Regulation No. 2 of 2007 regarding Procedures for Obtaining, Losing, Renouncing, and Regaining the Indonesian Citizenship, Special Procedures of Naturalization for children who have dual citizenship due to their ignorance or lack of information on citizenship status provide for their opportunity to choose their Indonesian citizenship in the case of special requirements with respect to Employment and non-tax state revenues.

Keywords: status; dual citizenship for children; citizenship.

Edward James Sinaga (Law and Human Rights Research and Development Agency the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia)

Authentication Services for Legal Certainty

Law Research Journal De Jure, 2019 March, Volume 19, Number 1, Page 85 - 96

The Directorate General of Public Legal Administration provides some legal services, one of them is the authentication service. Authentication service is the answer that may meet the legal service needs and is expected to provide legal certainty to the users at large. This research aims to analyze the authentication process of the official signatures. This research is empirical legal research with a qualitative approach. Data and information are obtained by interviews. The results of this research confirm that the authentication process of the official signatures is able to provide legal certainty to users. The signatures authentication, under the jurisdiction of the Ministry of Law and Human Rights, may not be interpreted as approval for contents of the authenticated document, but only to certify the authenticity of the signatures of the officials who signed the authenticated document. It is necessary to raise the awareness of the government officials or public officials appointed by the government to immediately send their signature specimens to be recorded in the database of the Directorate General of Public Legal Administration.

Keywords: authentication; signatures; issuance.

The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.

This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

Rahmat Ramadhani (The School of Law, Muhammadiyah University of North Sumatra)

Indigenous Legal Communal Rights in the Land Acquisition for Public Purposes

Law Research Journal De Jure, 2019 March, Volume 19, Number 1, Page 97 - 108

One of the significant issues that needs to be considered in the land acquisition for the public purposes is the conversion of land title status from the land owner to the government agency who is in need of the land using compensation mechanism. The communal right of indigenous peoples over land is important to question in relation to this land acquisition issue. This research uses a normative juridical legal research method (normative research) with descriptive analysis using secondary data. The data collection procedures are in the form of documentation of notes or quotes, search of legal literature, books and others publications related to the identification of the issues both offline and online which is then analyzed through the content analysis method focusing on the issues of the legal standing of the indigenous people's communal rights in the land acquisition law. And the land acquisition procedures if the objects belong to the indigenous people under communal rights? From the research results one may conclude that the Law No. 2 / 2012 does not specifically regulate the acquisition procedures of land originating from customary rights or which according to the Minister of Agrarian and Spatial Planning / the Head of the National Land Agency No. 10 / 2016 is called the communal rights. The communal rights are recognized under the Law on Land Acquisition in the explanation of Article 40 of the Law No. 2 / 2012 providing for that those entitled to receive compensation include the Indigenous People. As for the acquisition of the land under customary rights should be realized using the "fair and just" compensation mechanism by means of land substitution, resettlement, or any other forms agreed by the impacted community.

Keywords: rights; communal; land; public purposes.

Sri Lestari Poernomo (Lecturer of the School of Law, Indonesian Muslim University)

Standard Contract in Legal Perspectives of Consumer Protection

Law Research Journal De Jure, 2019 March, Volume 19, Number 1, Page 109 - 120

Standard contract or agreement usually uses exoneration clauses in consumer transactions. Standard contract basically is created from the public needs aimed to provide convenience or practical use for the parties in dealing transactions. The researched issue is the applicability of the standard contract in the perspective of Consumer Protection Law? The research uses normative legal research method with a statute approach, conceptual approach and by observing the experts opinions related to the issues. The research results indicate that the standard contract containing so many exoneration clauses creates legal consequences for consumers, as the obligations the business doers should have assumed will transfer to the consumers. The Consumer Protection Law requires businesses to immediately adjust the standard contract to comply with the provisions of the Laws, but in practice this is difficult. Restrictions and requirements on the use of standard contracts are intended to position the consumers on par with the business doers based on the principle of freedom to make contract and to prevent any issues that may harm the consumers due to ignorance and imbalance factors as well as manipulation by business doers to gain profits.

Keywords: legal protection; standard contract; consumers.

**The keywords noted here are the words which represent the concept applied in article.
This abstract sheet may be reproduced without permission or charge**

Novita Sari (Research and Development Division of the National Narcotics Agency)

Judicial Review on Students / College Students when Acquiring Drugs

(Study on the Drug Abuse Survey in Student and College Student Groups in 2016)

Law Research Journal De Jure, 2019 March, Volume 19, Number 1, Page 121 - 136

Illegal drug trafficking is currently targeting all levels of society, including children (students/college students). Children are highly curious, the drug dealers know and misuse this. The addictive effect caused by the drug abuse is the main purpose of the drug dealers. Because of addiction, one will try everything to get what s/he needs. Many students / college students had tried many ways to get money to buy drugs such as using their pocket moneys, tuition fees, selling their own goods, cheating, stealing, prostituting themselves and becoming a drug courier. Among these efforts, some may still be tolerated but the other should be classified as criminal offenses. Criminal offenses by a student / college student in obtaining drugs are a form of crime committed to support their main ideas, the drug abuse, which is threatened with jail / imprisonment terms. Referring to the Juvenile Criminal Justice System Law, one should observe the criminal weights given to determine the diversion level that may be employed to save the child's future and to avoid negative stigma, as well as the offenses that deserve no diversion. The engagement of students/college students to become drug couriers should observe also the modus operandi of the dealers in the distribution of the drugs.

Keywords: drug addiction; students; how to obtain; juvenile offenses; diversion.

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya**

Eko Noer Kristiyanto (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)

Jangkauan Hukum Nasional terhadap Prostitusi Daring

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 1, Maret 2019, Halaman 1 - 10

Prostitusi daring adalah keniscayaan ketika teknologi dan akses internet semakin masif dalam kehidupan masyarakat. Prostitusi apapun bentuknya seringkali menimbulkan keresahan karena dianggap melanggar norma-norma yang berlaku. Hukum dianggap mampu menjadi solusi untuk menanggulangi persoalan ini. Penelitian ini mencoba menjelaskan eksistensi prostitusi daring dan sejauh mana hukum nasional mampu menjangkau aktivitas prostitusi daring. Ternyata walau tidak ada aturan yang spesifik terkait prostitusi daring namun aparat penegak hukum tetap dapat menjerat para pelaku ketika kondisi-kondisi tertentu terpenuhi.

Kata kunci: prostitusi daring; norma; internet; penegak hukum.

Qur'ani Dewi Kusumawardani (Badan Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Komunikasi dan Informatika)

Perlindungan Hukum bagi Pengguna Internet terhadap Konten Web Umpan Klik di Media Online

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 1, Maret 2019, Halaman 11 - 30

Internet telah menciptakan peluang, tantangan serta mempengaruhi perubahan kultur digital di Indonesia. Berdasarkan penelitian Badan Penelitian dan Pengembangan SDM Kementerian Komunikasi dan Informatika di tahun 2017 diketahui bahwa 72,13% masyarakat Indonesia merupakan pengguna perangkat TIK, namun rendahnya tingkat literasi dan kebiasaan malas membaca mempermudah orang Indonesia terkena umpan klik. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini yaitu pertama, belum terdapat aturan yang secara khusus mengatur clickbait. Clickbait headline saat ini banyak digunakan di dunia jurnalistik, dan artikel ini dianggap sebagai artikel yang tidak melanggar hukum jika hanya mendasarkan aktivitas nya pada judul yang melebih-lebihkan semata, namun artikel clickbait akan dianggap illegal jika mengandung illegal content seperti penghinaan, pencemaran nama baik, pelanggaran kesusilaan, berita bohong, perjudian, pemerasan, pengancaman, penipuan yang dapat merugikan konsumen, provokasi yang menimbulkan rasa kebencian terhadap suku, agama, ras dan antar golongan (SARA), meningkatkan permusuhan antar individu, mengandung ancaman kekerasan atau menak-nakuti secara pribadi. Kedua, cara mengurangi artikel click bait melalui pendidikan, meningkatkan literasi masyarakat, pembelajaran teknik konsumsi berita kritis, atau dapat ditempuh melalui jalur hukum baik perdata ataupun pidana.

Kata kunci: perlindungan hukum; clickbait; media online.

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Tony Yuri Rahmanto (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hak Asasi Manusia Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)****Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penipuan Berbasis Transaksi Elektronik**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 1, Maret 2019, Halaman 31 - 52

Tindak pidana penipuan saat ini semakin berkembang mengikuti perkembangan zaman dan kemajuan teknologi. Aturan hukum dibuat untuk mengantisipasi hal tersebut namun aturan yang ada rupanya tidak membuat tindak pidana tersebut semakin berkurang tetapi mengalami peningkatan. Penelitian ini bertujuan untuk: pertama, mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce; dan kedua, mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan berbasis e-commerce. Penelitian ini dilakukan dengan metode yuridis normatif melalui studi kepustakaan dengan menelaah data sekunder meliputi peraturan perundang-undangan, hasil penelitian, jurnal ilmiah dan referensi. Hasil penelitian menggambarkan bahwa tindak pidana penipuan berbasis e-commerce pada prinsipnya sama dengan penipuan dengan cara konvensional namun yang menjadi perbedaan terletak pada alat bukti atau sarana perbuatannya yakni menggunakan sistem elektronik (komputer, internet, perangkat telekomunikasi). Oleh karenanya penegakan hukum mengenai tindak pidana penipuan ini masih dapat diakomodir oleh Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selanjutnya, Hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan berbasis Transaksi elektronik masih dipengaruhi oleh lima faktor yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, faktor masyarakat dan faktor kebudayaan.

Kata kunci: penegakan hukum; penipuan; transaksi elektronik.**I Wayan Gede Rumega (Fakultas Hukum Universitas Udayana Bali) Hakim****Komisaris dan *Miscarriage of Justice* dalam Sistem Peradilan Pidana**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 1, Maret 2019, Halaman 53 - 68

Proses penegakan hukum pidana ternyata dapat menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi pelaku sebagai akibat dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum pidana. Berkaitan dengan hal itu sebagaimana hukum acara pidana menyediakan sarana untuk menguji tindakan-tindakan aparat penegak hukum yang melanggar hak asasi manusia. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana fungsi hakim komisaris dalam menangani *Miscarriage of Justice* menurut sistem peradilan pidana di Indonesia? Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif/pendekatan diskriptif analisis. Keberadaan hakim komisaris dengan maksud untuk lebih memberi jaminan perlindungan terhadap HAM seseorang yang menjadi tersangka/terdakwa dalam proses peradilan pidana. Dengan adanya hakim komisaris mencegah terjadinya perbedaan pandangan mengenai keabsahan tindakan hukum pada pemeriksaan pendahuluan yakni mengenai keabsahan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan karena tindakan hukum tersebut terkait dengan persoalan hak asasi manusia yang ditetapkan sebagai tersangka/terdakwa yakni mengenai kemerdekaan dan kebebasan, kepemilikan terhadap harta kekayaan dan perlindungan terhadap rasa aman dan tentram. Jaminan perlindungan terhadap hak tersangka/terdakwa pada tahapan pemeriksaan pendahuluan sebagai perwujudan dari fungsi hukum acara pidana yaitu menyelenggarakan peradilan yang adil (*fair trial*) dalam rangka untuk menemukan kebenaran materiil atau kebenaran yang hakiki. Dan upaya paksa yang dilakukan oleh Penyidik untuk mendapatkan bukti permulaan yang cukup bukan hanya diserahkan sepihak kepada penyidik akan tetapi harus ada pengujian yang dilakukan oleh hakim komisaris.

Kata kunci: hakim komisaris; *miscarriage*; peradilan pidana.

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Nevey Varida Ariani (Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)****Prosedur Pewarganegaraan Akibat Status Anak Berkewarganegaraan Ganda dalam Peraturan Perundang-Undangan**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 1, Maret 2019, Halaman 69 - 84

Dalam hal status kewarganegaraan, negara bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak kewarganegaraan sebagai bentuk perlindungan negara terhadap warga negaranya. Pengaturan hal ikhwal kewarganegaraan dalam bentuk peraturan perundang-undangan merupakan salah satu bentuk manifestasi tanggung jawab negara dalam urusan kewarganegaraan, maka timbul permasalahan tentang proses pewarganegaraan akibat status anak berkewarganegaraan ganda berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Metode penelitian yuridis-empiris. Dalam penegakkan hukum anak berkewarganegaraan ganda terbatas berkaitan dengan tugas dan fungsi dari Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM serta Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri terkait KTP elektronik seumur hidup pada usia 18 tahun dan ketentuan perundang-undangan tentang memilih kewarganegaraan di usia maksimal 21 tahun. Perlu Perubahan Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2007 tentang Tatacara Memperoleh, Kehilangan, Pembatalan, dan Memperoleh Kembali Kewarganegaraan RI melalui prosedur khusus pewarganegaraan bagi anak berkewarganegaraan ganda karena kelalaiannya ataupun kurangnya literasi status anak berkewarganegaraan terbatas tersebut untuk dapat memilih Kewarganegaraan Indonesia dalam hal persyaratan khusus Pewarganegaraan terkait Pekerjaan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Kata kunci: status; anak berkewarganegaraan ganda; pewarganegaraan.**Edward James Sinaga (Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia)****Layanan Hukum Legalisasi dalam Upaya Memberikan Kepastian Hukum**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 1, Maret 2019, Halaman 85 - 96

Layanan jasa hukum berupa pemberian legalisasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Pemberian legalisasi merupakan jawaban terhadap pemenuhan kebutuhan layanan hukum serta diharapkan dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kepastian hukum pemberian legalisasi tanda tangan pejabat. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empirik dengan pendekatan kualitatif. Data dan informasi diperoleh melalui wawancara. Hasil dari penelitian ini menegaskan bahwa pemberian legalisasi tanda tangan pejabat dapat memberikan kepastian hukum kepada para pengguna. Legalisasi tanda tangan pejabat yang merupakan kewenangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia agar tidak ditafsirkan sebagai persetujuan terhadap keseluruhan isi dokumen yang dilegalisasi, melainkan sebatas pengesahan tanda tangan pejabat yang menandatangani dokumen yang dilegalisasi. Perlunya peningkatan kesadaran pejabat pemerintah atau pejabat umum yang diangkat pemerintah untuk segera mengirimkan spesimen tanda tangan untuk dicatat dalam database Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum. Untuk itu perlu dilakukan sosialisasi materi legalisasi hukum perdata umum untuk dilaksanakan di daerah.

Kata kunci: legalisasi; tanda tangan; pemberian

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Rahmat Ramadhani (Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)****Eksistensi Hak Komunal Masyarakat Hukum Adat dalam Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 1, Maret 2019, Halaman 97 - 108

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengadaan tanah bagi kepentingan umum adalah peralihan status hak atas tanah dari pihak pemilik tanah kepada pihak instansi yang membutuhkan tanah dengan mekanisme ganti rugi. Eksistensi hak komunal masyarakat hukum adat (MHA) atas tanah penting untuk dipertanyakan dalam kaitan pengadaan tanah. Penulisan ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif (normatif research) dengan spesifikasi penelitian deskriptif analistisyang menggunakan data skunder. Prosedur pengumpulan datanya adalah berupa dokumentasi catatan atau kutipan, penelusuran literatur hukum, buku-buku dan lainnya yang bertalian dengan identifikasi masalah baik secara cara offline maupun onlinenyang kemudian dianalisa melalui metode analisa konten (centent analysis method) dengan fokus padapermasalahan tentang bagaimana eksistensi hak komunal MHA dalam undang-undang pengadaan tanah? dan bagaimana pengadaan tanah yang objeknya hak komunal?. Dari hasil penelitian diketahui bahwa UU No.2/2012 tidak mengatur secara khusus tentang objek pengadaan tanah yang berasal dari hak ulayat atau menurut Permen ATR /Ka. BPN No.10/2016 disebut hak komunal, eksistensi hak komunal terlihat dalam UU Pengadaan tanah dalam penjelasan Pasal 40 UU No.2/2012 yang menegaskan bahwa yang berhak menerima ganti rugi antara lain MHA. Sedangkan untuk pegadaan tanah yang objeknya hak komunal (hak ulayat) dilakukan melalui mekanisme ganti kerugian yang 'layak dan adil" dengan cara; pemberian tanah pengganti, permukiman kembali, atau bentuk lain yang disepakati oleh masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Kata kunci: hak komunal tanah; kepentingan umum.**Sri Lestari Poernomo (Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia)****Standar Kontrak dalam Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 1, Maret 2019, Halaman 109 - 120

Standar kontrak atau perjanjian baku adalah penggunaan klausula eksonerasi dalam transaksi konsumen. Standar kontrak pada dasarnya lahir dari kebutuhan masyarakat yang bertujuan untuk memberikan kemudahan atau kepraktisan bagi para pihak dalam melakukan transaksi. Permasalahan yang diteliti adalah bagaimana keberlakuan standar kontrak dalam perspektif hukum perlindungan konsumen? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pandangan para ahli yang terkait dengan permasalahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Standar kontrak yang mengandung klausula eksonerasi menimbulkan akibat hukum bagi konsumen yaitu tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada pelaku usaha menjadi tanggung jawab konsumen. Undang-Undang Perlindungan Konsumen mewajibkan pelaku usaha untuk segera menyesuaikan standar kontrak yang dipergunakan dengan ketentuan Undang-Undang tetapi dalam praktik hal tersebut sulit dilakukan. Larangan dan persyaratan tentang penggunaan standar kontrak dimaksudkan untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak dan mencegah timbulnya tindakan yang merugikan konsumen karena faktor ketidaktahuan, kedudukan yang tidak seimbang, dan dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk memperoleh keuntungan.

Kata kunci: perlindungan hukum; standard kontrak; konsumen.

Kata kunci bersumber dari artikel**Lembar abstrak ini dapat diperbanyak tanpa memerlukan izin dan biaya****Novita Sari (Bidang Penelitian dan Pengembangan Badan Narkotika Nasional)****Tinjauan Yuridis terhadap Upaya Pelajar/Mahasiswa dalam Memperoleh Narkoba**

Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Volume 19, Nomor 1, Maret 2019, Halaman 121 - 136

Peredaran gelap narkoba saat ini sudah menyasar ke seluruh lapisan masyarakat, tidak terkecuali pada usia anak (pelajar/mahasiswa). Anak memiliki rasa ingin tahu yang begitu besar, hal inilah yang dimanfaatkan para bandar. Efek kecanduan yang diakibatkan dari pemakaian narkoba menjadi tujuan utama para bandar. Karena kecanduannya inilah maka seseorang akan berusaha sedemikian rupa untuk mendapatkan yang dibutuhkan, begitu pula dengan pelajar/mahasiswa dimana banyak upaya yang dilakukan guna memperoleh uang untuk membeli narkoba seperti memakai uang saku, memakai uang SPP, jual barang sendiri, menipu, mencuri, jual diri dan menjadi kurir narkoba. Diantara upaya tersebut ada yang merupakan perbuatan yang masih dapat diberi toleransi maupun dalam bentuk perbuatan pidana. Perbuatan pidana yang dilakukan pelajar/mahasiswa dalam memperoleh narkoba merupakan bentuk pidana yang dilakukan untuk mendukung perbuatan utamanya yaitu penyalahgunaan narkoba, dimana dalam perbuatan tersebut diancam dengan hukuman penjara/kurungan. Jikamengacu pada Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak maka hendaknya perlu diperhatikan bobot pidana yang dilakukangunamenentukan upayadiversi yang dapat dikenakan untuk menyelamatkan masa depan anak dan untuk menghindari stigma negatif, sertapidana yang tidak dapat dikenakan upayadiversi. Sepertihalnya keterlibatan pelajar/mahasiswa menjadi kurir narkoba, hal ini hendaknya perlu diperhatikan pula adanya modus bandar narkoba dalam mengedarkan narkoba.

Kata kunci: kecanduan narkoba; pelajar/mahasiswa; cara memperoleh; pidana anak; diversi.